

ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

MUHAMMAD YASIN

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Surabaya

Muhammadyasin261092@gmail.com

ABSTRACT

Economic growth is a process of changing a country's economic conditions on an ongoing basis towards better conditions for a certain period. Economic growth can also be interpreted as a process of increasing the production capacity of an economy that is realized in the form of an increase in national income. With a good Regional Financial Performance this is because the greater the Regional Original Revenues obtained from local taxes, regional levies, the results of the management of separated regional assets and other legal income and the smaller the loan and central assistance, the more independent the region. With the increasingly independent area, the economic growth in the area can experience an increase. This is because the region is able to manage economically, efficiently, and effectively as well as the lack of intervention by the central government. economic growth with This means that if the income of the region will also cause an increase in the achievement of economic growth. which is very flexible in terms of utilization causes the regions to be more flexible in planning the allocation of the budget for development activities in accordance with its economic agenda which includes the development of basic facilities and infrastructure that play a role in supporting optimal economic growth.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang biasanya menjadi pendorong utama pertumbuhan, pada tahun 2016 hanya tumbuh 2,32% (naik Rp345 miliar).

Tabel 1. Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2015 dan 2016

Uraian	APBD Provinsi Jawa Timur		% Perubahan
	Th. 2015 (Juta Rp)	Th. 2016 (Juta Rp)	
PENDAPATAN DAERAH	22,246,181	24,368,078	9.54
PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,900,073	15,245,242	2.32
PAJAK DAERAH	12,329,300	12,579,000	2.03
RETRIBUSI DAERAH	152,223	111,423	(26.80)
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	351,542	365,629	4.01
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	2,067,009	2,189,190	5.91
PENDAPATAN TRANSFER	7,299,785	9,086,542	24.48
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	3,598,308	9,052,654	151.58
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	3,701,477	33,888	(99.08)
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	46,322	36,294	(21.65)
PENDAPATAN HIBAH	46,322	36,294	(21.65)
PENDAPATAN DANA DARURAT	-	-	-
PENDAPATAN LAINNYA	-	-	-

Sumber : BPKAD Jawa Timur

Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Jawa Timur masih dalam kategori baik, tercermin dari 62,56% anggaran pendapatan merupakan PAD. Pajak Daerah masih menjadi komponen terbesar PAD (pangsa 82,51% dari total PAD), namun pertumbuhannya melambat menjadi 2,03% setelah di tahun 2015 tumbuh 18,35%. Penurunan target pendapatan pajak antara lain diimplementasikan pada target pajak BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor) dan PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor). Penurunan target pendapatan pajak daerah tersebut diindikasikan sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas didominasi oleh konsumsi rumah tangga.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 27,77%, lebih tinggi dari triwulan II 2015 yang sebesar 26,86%, didorong oleh pajak daerah yang pada triwulan ini terealisasi 27,82%, lebih tinggi dari periode yang sama di tahun sebelumnya (24,55%). Tingginya realisasi penerimaan pajak daerah sejalan dengan upaya Pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan wajib pajak serta upaya penegakan hukum terkait perpajakan. Di samping itu perekonomian Jawa Timur yang mulai terakselerasi di triwulan II 2016 ini turut

memberikan dampak positif pada penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak daerah juga tercermin dari peningkatan penjualan mobil pribadi di Jawa Timur yang tumbuh 5,7% pada triwulan ini. Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri dari anggaran belanja dan anggaran transfer. Pada anggaran perubahan tahun 2016, keduanya mencapai Rp24,75 triliun atau naik 1,62% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp24,36 triliun. Peningkatan terjadi pada anggaran belanja operasi, sedangkan anggaran belanja modal dan transfer menurun. Anggaran belanja operasi sebesar Rp15,53 triliun atau meningkat 12,96% dibandingkan tahun 2015, dengan kenaikan terbesar pada belanja pegawai (30,95%), disusul oleh belanja hibah (25,41%) dan belanja bantuan sosial (12,59%).

Perumusan masalah

Peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur. 2) Bagaimana tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 3) Apakah terdapat pengaruh Kinerja Keuangan Daerah

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Urgensi Penelitian

Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini bahwa urgensi penelitian ialah untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari setiap daerah untuk dilakukan pengelolaan keuangan yang dibutuhkan dari setiap daerah dan dapat dimaksimalkan untuk pertumbuhan ekonomi disetiap daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo dalam Fisanti (2013), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang

berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.

Pendapatan Asli Daerah adalah Pemerintah daerah melalui upayanya memenuhi kewajiban daerah salah satu tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian yang diharapkan secara langsung akan berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut pemerintah diharapkan dapat mempunyai sistem keuangan sendiri baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Keuangan Daerah

Menurut Tjahja Supriatna (2000), definisi keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (PBD). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah

No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan yang berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Kinerja keuangan daerah

Pengertian Kinerja seperti yang dikemukakan oleh Bastian (2001: 329) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Hal ini dikarenakan semakin besar PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah serta semakin kecil pinjaman dan bantuan pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut. Dengan semakin mandiri daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan daerah

tersebut mampu mengelola dengan ekonomis, efisien, dan efektif serta kurangnya campur tangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Tujuan Pengelolaan Keuangan

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab

Pertanggung jawaban (accountability) pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), kepala daerah (orang yang membawahi semua satuan tata usaha) dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup:

- a. Keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu.
- b. Pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah pengghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus di tata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).

3. Kejujuran

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

4. Hasil guna dan daya guna

Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai; mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

Unsur Utama Pengelolaan Keuangan

Unsur-unsur sistem keuangan pemerintah daerah dapat digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Unsur berkala dan usur hukum

Unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan berkala dalam setahun, yakni: menyusun program dan anggaran, pengeluaran dan penerimaan anggaran, urusan uang keluar dan uang masuk, mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Unsur hukum mencakup unsur-unsur pengaturan dan pemantauan kegiatan berkala, yakni: Undang-undang dan peraturan keuangan, transaksi dan pemeriksaan keuangan dari dalam.

2. Unsur-unsur luar dan dalam

Unsur luar meliputi pengaawasan yang dikenakan terhadap pemerintah daerah oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi (pemerintah pusat, dan terdapat Dati II oleh gubernur provinsi), berdasarkan hukum, peraturan dan pedoman: ratifikasi mengenai anggaran dan peraturan keuangan, laporan kebutuhan dan pemeriksaan keuangan dari luar. Adapun unsur dalam ialah unsur pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pedoman para pejabat keuangan pemerintah daerah. Unsur-unsur itu yang terpenting ialah

prosedur berkala seperti tersebut di atas, beserta peraturan-peraturan keuangan yang dirumuskan sendiri dan pemeriksaan keuangan dari dalam.

Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut mendasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah (Propenas 2002-2004).

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih

besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Todaro (2006) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tingkat Belanja Daerah pada kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Strategi APBD pada Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

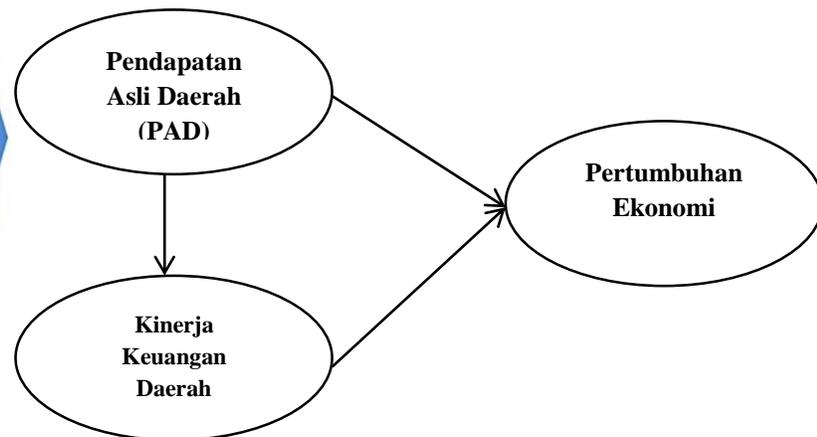
Manajemen APBD pada Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini peneliti membuat skema supaya dapat dipahami, agar penelitian ini bisa menjadi tolak ukur Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dalam memajukan daerahnya, peneliti membuat skema sebagai berikut:



**Gambar
Roadmap Penelitian**



Gambar . Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa angka. Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik (Hermawan, 2005).

Subyek Penelitian

Populasi

Populasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014, 80),

sehingga populasi adalah seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2014, 81). Sampel penelitian adalah 29 Kabupaten dan 9 Kota se-Jawa Timur

Batasan Penelitian

Sampel penelitian ditentukan dengan *Purposive random sampling* adalah metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu guna memenuhi syarat sampel yang baik. Kriteria tersebut yakni: Sampel adalah 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur selama 3 tahun

Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian menggunakan pengumpulan data informasi tertentu melalui dari Bapeda Jawa Timur.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data harus ada surat pengantar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur jalan putat indah no. 1 Surabaya selanjutnya surat pengantar dibawa ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Jalan Johar no 19-21 Surabaya.

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Metode analisis data merupakan kegiatan setelah data terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel atau jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiono, 2014, 147)

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif terdapat dua macam yaitu statistik deskriptif, dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametrik dan nonparametrik (Sugiono, 2014: 147). Dalam penelitian ini lebih pada statistik inferensial (sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiono, 2014: 148).

Analisis Kuantitatif

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi program PLS (*Partial Least Square*) versi 3.0 M3 PLS (*Partial Least Square*) dikembangkan pertama kali oleh wold sebagai metode umum untuk mengestimasi *path model* yang menggunakan konstruk laten dengan multipel indikator. PLS (*Partial Least Square*) merupakan *factor indeterminacy* metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. PLS (*Partial Least Square*) dapat juga digunakan untuk konfirmasi teori.

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, maka rancangan uji hipotesis yang dapat dibuat merupakan rancangan uji hipotesis

dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar (α) = 5% = 0,05 dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1.96. Sehingga jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik < 1.96), maka H0 diterima dan Ha ditolak dan jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-statistik > 1.96), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Keterangan:

X1 = PAD

Z1 = Kinerja Keuangan Daerah

Y = Pertumbuhan Ekonomi

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data realisasi APBD berdasarkan 29 kabupaten dan 9 kota Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2
 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tmur

Kabupaten		Kabupaten	
1.	Pacitan	21.	Ngawi
2.	Ponorogo	22.	Bojonegoro
3.	Trenggalek	23.	Tuban
4.	Tulungagung	24.	Lamongan
5.	Blitar	25.	Gresik
6.	Kediri	26.	Bangkalan
7.	Malang	27.	Sampang
8.	Lumajang	28.	Pamekasan
9.	Jember	29.	Sumenep
10.	Banyuwangi	Kota	

11.	Bondowoso	1.	Kediri
12.	Situbondo	2.	Blitar
13.	Probolinggo	3.	Malang
14.	Pasuruan	4.	Probolinggo
15.	Sidoarjo	5.	Pasuruan
16.	Mojokerto	6.	Mojokerto
17.	Jombang	7.	Madiun
18.	Nganjuk	8.	Surabaya
19.	Madiun	9.	Batu
20.	Magetan		

Tabel 2 menjelaskan tentang kabupaten dan kota di Jawa Timur di mana terdapat di 29 kabupaten dan 9 kota sehingga dapat deskripsikan pada tabel yang sudah dikelompokkan setiap variabelnya:

Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis deskriptif merupakan suatu analisis data dengan cara mendiskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau populasi di mana sampel diambil (generalisasi). Analisis digunakan untuk mendiskripsikan nilai-nilai dari hasil pengolahan data-data masing-masing variabel. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung masing-masing indikator serta menganalisis tanggapan dari responden berdasarkan hasil data yang diolah.

Uji Statistik

Untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistic. Pada PLS hal tersebut dilakukan dengan melihat *Algorithm Bootstrapping report*, berikut hasilnya:

Tabel 3
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values, P-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Hipotesis
PAD -> Kinerja Keuangan	-0.355	-0.411	0.202	1.755	0.080	Tdk Sig
PAD -> Pertumbuhan Ekonomi	0.355	0.376	0.174	2.040	0.042	Sig
Kinerja Keuangan -> Pertumbuhan Ekonomi	-0.165	-0.174	0.155	2.779	0.286	Tdk Sig

Diolah oleh peneliti

Path Coefficient menunjukkan tingkat signifikansi dan hubungan antar variabel. Dengan demikian memberikan hasil sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

PAD terhadap Kinerja Keuangan daerah di kabupaten dan kota se-jawa timur

adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 1.755 (<1,96). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.355 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap Kinerja Keuangan daerah adalah negatif.

Dapat diartikan Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang tidak signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh beberapa Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah menurut Mardiasmo dalam Fisanti (2013) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber yang terlihat bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output daerah yang tercermin pada PDRB yang dihasilkan berbagai sektor pendapatan di Kabupaten/Kota tidak berjalan secara maksimal. Menurut Lewis dalam Ahyani (2010) Tidak efektifnya berbagai peraturan yang dilakukan pemerintah bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif

antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan publik. Selain itu pembebanan biaya atas barang maupun jasa yang ditawarkan yang harus ditanggung oleh perusahaan daerah turut serta mengurangi output yang dihasilkan. Dengan kurang maksimalnya PDRB yang dihasilkan suatu daerah tentu akan mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. karena tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak terlepas dari tingkat kenaikan PDRB daerah tersebut. Jadi sangat penting untuk pemerintah daerah memaksimalkan sektor pendapatannya agar mendapat output yang maksimal di setiap sektornya.

H2 : Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.040 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0.355 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap Pertumbuhan ekonomi adalah positif.

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi pada Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menekankan hasil PAD yang berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk Penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang.

H3 : Terdapat pengaruh signifikan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

Kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak

signifikan dengan t-statistik sebesar 1.068 ($<1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.165 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif.

Bahwa kinerja keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan memiliki peran penting dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah setelah otonomi memiliki wewenang mengelola dana yang cukup besar dan apabila tidak dibarengi dengan kinerja keuangan atau efisiensi anggaran maka dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan prioritas pembangunan di daerahnya dan cenderung mengalami pemborosan anggaran. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setiap tahunnya terus meningkatkan efisiensi anggarannya dengan mengeluarkan kebijakan maupun program dengan prinsip pemerintahan good governance, transparan dan akuntabilitas seperti mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik, regulasi tentang perjalanan dinas luar daerah yang terus diperbaharui, pelelangan barang dan jasa secara elektronik, transparansi anggaran lewat media elektronik,

pengawasan dan audit keuangan yang semakin ketat dan kebijakan-kebijakan yang lain sehingga pengeluaran pembangunan yang bersumber dari komponen APBD dapat mendorong laju perekonomian.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menguji “Analisis struktur APBD terhadap kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur”. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa:

1. PAD terhadap Kinerja Keuangan daerah di kabupaten dan kota se-Jawa Timur adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 1.755 ($<1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.355 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap Kinerja Keuangan daerah adalah negatif.
2. PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 2.040 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0.355 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap Pertumbuhan ekonomi adalah positif.
3. Kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan dengan t-

statistik sebesar 1.068 ($<1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.165 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif.

Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Daerah di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana meningkatkan kinerja keuangan Daerah sehingga dapat diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur bisa sejahtera.
2. Kinerja Keuangan yang ada di setiap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur untuk tetap dipantau oleh Kepala Daerah supaya bisa dimaksimalkan keuangan tersebut dalam Pertumbuhan Ekonomi di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
3. Diharapkan penelitian selanjutnya, studi atau kajian yang akan dilakukan

sebaiknya mencakup variabel lain untuk dikembangkan.

4. Penambahan variabel baru sebagai variabel independen, variabel dependen maupun variabel moderat sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Wahid. 2010. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dan Pengganguran Pasca Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah). Skripsi, Tidak Dipublikasikan. Universitas Brawijaya
- Arsyad, L. (1999) Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- BPS, Statistik Jawa Timur dalam Angka, Surabaya: Jawa Timur, Badan Pusat Statistik.
- Imam Ghozali. 2014. Partial least squares konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program Warp PLS 4.0, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo, 2002. "Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah". Makalah. Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat.
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.

Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang dana perimbangan

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia

Supriatna Tjahja. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Rineke Cipta. Jakarta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supriatna Tjahja. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Rineke Cipta. Jakarta.

Todaro M.P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Todaro. M.P., 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.

_____. 2004. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 5, No. 2, Desember 2004, hal. 147-159.

_____, 2004, Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat, Yogyakarta: STIE YKPN.

_____. 2004. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 5, No. 2, Desember 2004, hal. 147-159.

_____, 2004, Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat, Yogyakarta: STIE YKPN.

BPS, Statistik Jawa Timur dalam Angka, Surabaya: Jawa Timur, Badan Pusat Statistik.

